



Rusman Ali Ucap Syukur

■ Pertama Kali Terima Opini WTP

KUBU RAYA, TRIBUN - Bupati Kubu Raya, Rusman Ali mengatakan penghargaan atas diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK RI dari Kementerian Keuangan RI, adalah berkat kerja keras jajaran aparat pemerintah kabupaten dan dorongan dari segenap lapisan masyarakat. "Saya bersyukur Kubu Raya akhirnya dapat memperoleh WTP dari BPK atas laporan pengelolaan keuangan daerah di Kubu Raya. Target meraih WTP untuk pengelolaan keuangan di Kubu Raya merupakan janji saya kepada masyarakat untuk dapat meraih opini WTP ini," ujarnya sesaat menerima hasil LHP atas LKPD tahun 2014, di Gedung Kantor BPK RI Perwakilan Kalbar, Jumat (3/7).

Bupati Rusman Ali menuturkan penghargaan tersebut akan menjadi motivasi bagi Pemkab yang dipimpinnya untuk lebih giat lagi dalam mengelola keuangan daerah. Apalagi penghargaan tersebut didapatkan untuk kali pertama, setelah tahun ini berhasil meraih penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dirinya mengatakan penghargaan ini untuk semua jajaran SKPD Kubu Raya, di mana sebelumnya hanya mampu meraih WDP

WTP merupakan jenjang tertinggi opini yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan yang dibuat oleh Pemkab yang telah sesuai dengan standar. WTP

DIDI BUDI SATRIO

Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar

(Wajar Dengan Pengecualian).

"Saya memberikan terima kasih yang besar bagi seluruh jajaran SKPD seperti keuangan dan inspektorat. Opini WTP harus dijadikan cambuk kedepan agar pengelolaan keuangan pada tahun depan dapat lebih baik," ujarnya.

Kubu Raya merupakan tujuh kabupaten/kota yang mendapatkan predikat WTP dari total 11 Kabupaten/Kota yang diberikan penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2014.

Janjang Tertinggi

Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar Didi Budi Satrio menuturkan berbicara mengenai opini dari BPK apakah itu WTP maupun WDP merupakan hal yang berkenaan dengan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

"WTP merupakan jenjang tertinggi opini yang diberikan oleh BPK atas laporan keuangan yang dibuat oleh Pemkab yang telah sesuai

dengan standar. Artinya dari dapat dilihat akuntabilitas laporan yang Pemda susun," katanya

Dirinya juga menjelaskan predikat WTP sekalipun yang diberikan kepada Pemda dari hasil laporan keuangannya bukan berarti kalau sudah dapat WTP itu clear atau tidak ada korupsi dan tidak ada masalah dalam laporan keuangan. Ada masalah akan tetapi nilainya bukan material. "Kita anggap untuk satu laporan tidak begitu mempengaruhi penyajian laporan keuangan," katanya

Dikatakannya, mengenai kabuapaten lain yang masih belum bisa meraih opini BPK pada prinsipnya membuka ruang komunikasi dan diskusi bukan ruang untuk konsultasi. BPK tidak bisa memberikan konsultasi kepada Pemda dalam penyusunan laporan keuangannya.

"Kami di BPK bukan pihak yang bisa memberikan konsultasi. akan tetapi kita memberikan ruang diskusi jika pada penyusunan laporan keuangan daerah merupakan. Apakah hasil diskusi tersebut maupun di pakai atau tidak itu terserah Pemda yang bersangkutan," katanya.

Dirinya menjelaskan BPK mempunyai kewenangan hanya untuk menilai laporan keuangan dari Pemda, mengenai insentif yang akan diberikan kepada pemerintah daerah yang akan diberikan kepada Pemda yang meraih WTP itu merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat agar Pemda berpacu untuk selalu mengejar WTP. "Seperti apa yang disampaikan oleh Wali Kota Pontianak, mereka yang meraih WTP mendapatkan suport dari pemerintah pusat apakah itu dari segi anggaran ataupun program dari Pemerintah Pusat. Pola demikian merupakan cara agar Pemda berlomba-lomba untuk memperbaiki laporan Keuangannya," katanya. (dan)